

MORALITAS WARTAWAN ANTARA IDEALITA DAN REALITA

Muzakkir

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

Email: muzakkir@utu.ac.id

ABSTRACT

Studies and analysis in this paper in the background backs a problem that mass media lately in broadcasting information to the public seems less idealistic, so the news is worth humanity and religion seems less a place in the mass media. In fact, there are still many in the news media often ignore the moral (ethics). That is a lot of information that is communicated or written using vulgar languages. Violating moral in conveying information to the public means that it can provoke anger and hatred can even lead to lawsuits against the mass media. Morality journalism is an attempt to prevent journalists have a negative effect through his writings. Idealist, a journalist in conveying information to the public, guided by moral principles, write down what happened to the state / condition really is. In the matter of morality, consciously absolute journalists to determine and choose exactly what you want to talk to the public. Moral is civility (courtesy) as a guide for obtaining the meaning of morality in the true sense. Moral awareness, a journalist must be built upon a strong foundation in a manner that is able to distinguish between error with truth. For the purpose of this study wanted to know how the application of the moral, the journalist's role in conveying information to the public. In order to gather and collect data and information is current and accurate, the author uses a qualitative method through observation, interviews with content analysis approach and using analytical writing techniques framing. Studies conducted in the formulation of the problem in this paper, revolves around the application of Journalists Between Morality and Reality Idealita in conveying information to the public. The research found, it turns out there is still a use of language that ignores the moral, for example in Harian Serambi Indonesia

Keywords: *Morality journalism, Idealita and reality, news Analysis*

1. PENDAHULUAN

Memaknai idealita pada hakikatnya mudah. Idealita itu memiliki makna ‘apa yang seharusnya didapatkan/diperoleh’. Wartawan dituntut mengembangkan profesi jurnalistiknya untuk mencerdaskan bangsa. Namun, realita yang sesungguhnya belum mampu seorang wartawan yang bekerja profesional secara utuh bisa mendapatkan kehidupan yang layak.

Kode etik jurnalistik pada intinya harus mendarah daging bagi wartawan Indonesia, sehingga pelanggaran yang dilakukannya akan segera dirasakan pada hati nuraninya. Perasaan salah akan menghantui seorang wartawan karena pelanggaran terhadap kode etik. Betapapun juga sebagai manusia, wartawan Indonesia tidak alpa dari kesalahan.

Untuk itu, pentingnya etika pers sebagai pedoman moral bagi wartawan. ‘Moralitas’ memiliki makna sama dengan ‘moral’. Bahkan secara etimologis, kata ‘etika’ sama dengan ‘moral’ karena kedua kata tersebut memiliki arti yakni kebiasaan, adat. Yang membedakan hanya segi bahasa asalnya saja ‘etika’ (yunani) dan ‘moral’ (latin).

Moralitas merupakan keseluruhan norma-norma, nilai-nilai dan sikap seseorang arau masyarakat. Moralitas adalah sikap hati yang terungkap dalam perbuatan lahiriah. Moralitas terdapat apabila orang mengambil sikap yang baik karena ia sadar akan

kewajiban dan tanggungjawabnya dan bukan ia mencari keuntungan. Moralitas sebagai sikap dan perbuatan baik buruknya perbuatan manusia. (Frans Magnis Suseno, 1993)

Aceh salah satu provinsi di Indonesia yang mendapat keistimewaan untuk menerapkan Syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Dalam hal pelaksanaannya, hal tersebut menyangkut berbagai sektor, termasuk dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat melalui pemberitaan media.

Sejumlah media massa yang kini menjadi gudang informasi bagi masyarakat yang nantinya juga akan berhadapan dengan penerapan qanun tentang pers dan penyiaran islam, seperti Harian Serambi Indonesia yang kini menjadi harian yang dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh Aceh.

Dalam hal penyampaian sejumlah informasi kepada masyarakat, Harian Serambi Indonesia sebagai media yang beredar di kalangan penduduk yang mayoritas muslim tentunya sangat diharapkan dapat membantu proses syi'ar Islam dalam berita sebagai bentuk pengawasan terhadap moralitas kewartawannya. Sejumlah informasi yang disajikan setiap harinya, Harian Serambi Indonesia tidak luput dari pengawasan terhadap moral (etika) jurnalistik yang dipegangnya.

Disamping itu, tugas wartawan dan media tidak sebatas berperan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat semata, tetapi lebih dari itu, wartawan dituntut sesuai dengan moral (etika) jurnalistiknya dapat melahirkan berita-berita yang mampu membuat masyarakat memahami dan mengambil pelajaran yang berguna dari berita yang dipublikasikan.

Salah satu contoh berita yang mengabaikan moral dalam pemberitaan Harian Serambi Indonesia:

Dulu Mesum, Kini Maisir

PEMBUBARAN – Eksekusi cambuk di Sabang, Kamis 23 Mei 2013, mengingatkan kita pada kasus mesum yang melibatkan Ketua PN Sabang di Hotel Mess Pamen Samudera. "Waktu itu, Ketua PN Sabang bebas tanpa mengikuti proses persidangan Mahkamah Syar'iyah hingga diselamatkan Mahkamah Agung (MA) dan dipindahkan ke Yogyakarta menjadi hakim nonpalu," kata Ketua Umum PB-Ippemas, Sulaiman. (Harian Serambi Indonesia, Senin 27 Mei 2013, h.1)

2. MORALITAS WARTAWAN

Moral adalah sikap dan perilaku ideal berdasarkan pertimbangan akal yang dimiliki manusia. Hanya moral yang baik dan keberhati-hatian yang dapat menolong seorang wartawan dalam urusan ini. Seorang wartawan tidak akan menguraikan secara detail keadaan seorang korban pemerkosaan, yang mengalami trauma yang sangat memilukan, seandainya ia sadar bahwa deskripsi tentang keadaan korban akan menyebabkan pembaca dihantui rasa kecewa, marah, sehingga terganggu secara psikologis, atau tertusuk nurani kemanusiaannya. (Maskun Iskandar, 2004)

Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup tentang baik buruknya perbuatan manusia. (W. Proespoprojo, 1998).

Moralitas dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun. Dalam batasan pengertian tersebut, maka moral bisa untuk dimensi duniawi dan bisa untuk ukhrawi. Sebab, baik buruknya sesuatu masih perlu pembahasan. Sementara pada makna kedua, yakni tentang

hak dan kewajiban moral perlu pembahasan lebih luas dan komprehensif. Namun, konotasi umum lebih cenderung kepada “keagamaan”.(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002)

Jurnalistik yang merupakan bagian pembicaraan komunikasi bertujuan juga membentuk perilaku seseorang baik sesama manusia maupun dengan Khaliknya. Kaitan dengan ini dijelaskan, berkomunikasi adalah berperilaku. Seseorang manusia berkomunikasi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan membina hubungan antar sesama manusia, merasa dihargai dan menghargai.(A. Rani Usman, 2009)

Pengertian komunikasi yang diberikan A. Rani itu, sangat terikat pada rambu-rambu moral bagi wartawan muslim sesuai perintah Islam. Membina hubungan sesama manusia artinya saling mengajak, mempengaruhi, dan sekaligus membentuk karakter dan sikap seseorang dalam membangun kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Untuk itu, rasa tanggung jawab para wartawan muslim kepada Allah dan kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban. Firman Allah dalam surat An-Nahlu ayat 125, Artinya, “*Ajaklah kepada jalan Tuhannya dengan hikmah (kebijaksanaan) dan dengan penerangan yang baik dan berdiskusilah dengan cara yang lebih baik,*” (QS. An-Nahl:125)

Oleh karena itu, peran wartawan yang dianggap sebagai penyampai informasi lewat tulisan, harus mengedepankan moral kewartawannya secara benar sesuai dengan yang diamanahkan oleh kode etik jurnalistik itu sendiri. Disamping itu, wartawan yang juga sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) berkewajiban melakukan perubahan perilaku sosial masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan adalah metode *kualitatif* dengan menggunakan pendekatan *Content Analysis* (analisis isi) . Melalui metode ini, penulis berupaya memberikan gambaran tentang berita-berita yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian dimaksud merupakan suatu prosedur dengan menghasilkan data *deskriptif* melalui tulisan dan secara lisan yang diperoleh dari individu-individu yang dapat diamati.

Metode kualitatif berkaitan erat dengan paradigma interpretatif dapat dilihat dalam beberapa karakteristiknya:

- a. Kata. Riset kualitatif berfokus pada kata, bukannya angka.
- b. Keterlibatan peneliti; instrument utama riset kualitatif adalah peneliti terlibat dekat dengan orang-orang yang diteliti. (Christine Daymon, 2008).

Langkah-Langkah Penelitian

- a. Teknik pengumpulan data
 1. Data primer yaitu melalui hasil observasi dan wawancara.
 2. Data sekunder diperoleh dari surat kabar, dan buku-buku. Data-data yang terkumpul akan dianalisis agar pembahasan tulisan ini lebih objektif dan sempurna.
- b. Teknik Analisa data

Dalam teknik analisa data, penulis mendalami terlebih dahulu informasi/data yang terdapat dari sumber primer dan dari sumber sekunder, yang selanjutnya dianalisis dan diverifikasi untuk disimpulkan.

4. PEMBAHASAN

Nilai-nilai profesional bagi wartawan sebagaimana tercantum dalam setiap kode etik pers adalah akurasi, objektivitas, dan keseimbangan. Hal ini sejalan dengan prinsip-

prinsip moralitas wartawan dalam menjalankan profesinya selaku pihak yang bertanggungjawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Atas dasar itu, perusahaan pers Indonesia menetapkan moral (etika) sebagai berikut:

1. Perusahaan pers harus ditumbuh kembangkan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi dan sistem manajemen yang sehat;
2. Perusahaan pers tidak menyiarkan hal-hal yang merugikan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Perusahaan pers harus terbuka melayani klaim dari masyarakat;
4. Perusahaan pers atas inisiatif bersama memelihara iklim yang kondusif, dalam arti berjalannya kemerdekaan pers sebagai landasan dan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya industri pers;
5. Perusahaan pers tidak melakukan praktik memonopoli pembentukan opini publik dan memonopoli kepemilikan terhadap industri media massa;
6. Perusahaan pers bekerja sama dengan sesamanya bagi kehidupan industri pers yang saling menguntungkan dan menghindari persaingan curang;
7. Perusahaan pers harus memiliki standar profesi;
8. Perusahaan pers harus menghormati tata karma dan tata cara periklanan Indonesia serta wajib memberikan data yang akurat mengenai profil mediana;
9. Perusahaan pers melaksanakan hubungan dengan mitra kerjanya dengan jujur; dan
10. Perusahaan pers menghormati organisasi-organisasi pers dan lembaga lainnya yang berperan dalam pengembangan pers serta menjaga prinsip-prinsip kemerdekaan pers. (AS Haris Sumadiri, 2005).

Media cetak memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi sekaligus merubah pola pikir, sikap dan perilaku publik. Media yang dalam hal ini Harian Serambi Indonesia, dinilai dapat memainkan salah satu fungsinya sebagai saluran efektif dalam melakukan pendidikan moral bagi wartawan dan bagi kehidupan lainnya secara massal. Sebab, selain berfungsi menyiarkan informasi, media juga berfungsi mendidik, mengajak, dan menyajikan ruang ilmu pengetahuan bagi pembacanya. Bahkan, peranan media sebagai sarana komunikasi, sangat menentukan perubahan moral dan watak masyarakat.

Yarmen Dinamika adalah Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, menyebutkan, "jatuhnya jarum ke tumpukan jerami atau kutu menggigit kepala bocah yang jarang keramas. Kedua contoh itu peristiwa. Sama halnya dengan seorang petani yang jengkel gara-gara tanah yang dicangkulnya berbatu cadas, sehingga paculnya patah, itu juga peristiwa. Tetapi apakah semua itu cukup bernilai dan membuat pembaca tertarik?.

Untuk itu, seorang wartawan harus memiliki naluri yang kuat untuk memilih dan memastikan mana peristiwa yang layak diberitakan, mana pula yang tidak. Untuk memastikan layak tidaknya, maka *news value* (nilai berita) lah, tegas Yarmen yang menjadi indikatornya.

Idealita, Realita dan Bahasa

Di zaman kemajuan informasi dan teknologi sekarang ini, idealita dan realita tidak bisa 'diceraikan', karena kedua kata itu memiliki kesamaan dan kepentingan dengan wartawan. Untuk itu, menyampaikan informasi yang sesuai dengan idealita dan realita haruslah berimbang (*balanced*), atau melaporkan kedua sisi mata uang (*cover both sides*). Berita yang baik adalah berita yang tidak berat sebelah. Jika ada dua pihak yang berbeda

pendapat atau berbeda dalam memberikan keterangan, kedua-duanya haruslah diberi tempat pada berita yang sama.

Kalau ada pertikaian antara warga yang tanahnya kena gusur dengan pemerintah kota yang menggusur mereka, pendapat atau keterangan kedua pihak hendaknya diceritakan secara bersama-sama. Idealisnya, wartawan harus berpegang pada prinsip moral, kode etik wartawan ‘katakan yang benar walaupun pahit’.

Namun, tidak selamanya sebuah laporan dapat memenuhi asas berimbang, seperti yang menjadi tuntutan jurnalisme yang ideal. Jika gagal mendapatkan konfirmasi, wartawan harus menyebutkan bahwa apa yang dinyatakan dalam berita itu belum dikonfirmasi kepada pihak yang seharusnya memberikan konfirmasi. Pada *follow up* untuk berita tersebut keterangan hasil konfirmasi itu sudah harus disajikan, walaupun cara seperti itu bukanlah cara yang ideal.

Relevansi fakta yang disajikan, yang membantu pembaca memahami laporan tersebut, menjadi hal penting untuk dipertimbangkan. Kejelian si pelapor dalam menggali fakta dan menyeleksi pada saat disajikan kepada *audience* sangat menentukan.

Wartawan harus mempertimbangkan nilai akurasi dalam menyajikan fakta. Karena akurasi sangat menentukan dan penting dalam pemberitaan. Untuk mendapatkan akurasi, yang harus diutamakan adalah *check and recheck*.

Informasi yang disampaikan wartawan harus secara fair, jujur dan tidak berprasangka (*su`uzan*). Apakah subjektivitas itu “dosa”? pasti tidak, selama laporan itu jujur dalam menyajikan fakta. Jujur itu bermakna menyajikan fakta apa adanya tanpa dibumbui dengan opini si penulis dan tidak mendramatisasi, dan juga tidak diganggu oleh ikhtiar menyembunyikan kenyataan.

Wartawan yang baik tidak akan menceritakan tabrakan beruntun di jalan raya dengan menewaskan puluhan jiwa manusia sebagai “musibah mengerikan”. Dia tidak akan menggunakan istilah “kendaraan yang naas itu” di dalam ceritanya. Baik si pelapor atau wartawan tidak boleh membuat penilaian “mengerikan” atau “naas” karena semuanya itu harus diserahkan pada fakta yang sebenarnya didapatkan. Biarkan fakta yang merangsang pembaca untuk merasa ngeri atau berkesimpulan bahwa itu adalah kenyataan berupa nasib yang naas.

Ilustrasi yang diperlihatkan berita berikut ini terasa sederhana, tetapi yang seperti ini pun hendaknya dihindari dalam penulisan yang *fair*.

Cekgu Dihakisi Preman Politik

SIGLI – Hasil penyelidikan sementara oleh pihak kepolisian yang menyebutkan kematian T Muhammad Zainal Abidin alias Cekgu (30), kader Partai Nasional (PNA) Pidie terkait kasus sabu-sabu memicu kemarahan keluarga. “Penembak abang saya dilakukan preman politik,” tandas T Musliadi (29), adik kandung korban. (Harian Serambi Indonesia, Kamis 2 Mei 2013, h. 1)

Penulis berita yang *fair* selayaknya menghindari pemakaian istilah “Penembak abang saya dilakukan preman politik”. Penyebutan dan penulisan istilah tersebut dapat memancing suasana. Si pelapor, meskipun dari pihak keluarga korban, tidak perlu membuat penilaian yang belum pasti kebenarannya.

Disertai *background information* manakala ia diperlukan. Agar pembaca dapat memahami duduk perkara sebuah isu, latar belakang peristiwa atau masalah yang dilaporkan perlu diungkapkan dengan ringkas. Adakalanya, tanpa adanya paragraf *background information*, pembaca mendapat kesulitan memahami cerita dengan baik.

Angle berita haruslah tajam. *Angle* atau sudut bidik adalah alat bagi si pelapor untuk membantu pembaca melihat suatu kejadian atau masalah dari suatu segi yang lebih

jelas. Moral (etika) meliputi berbagai aspek. Ia dapat menyangkut nama baik, dan harga diri seseorang, yang dapat berubah menjadi kasus hukum. Dalam menulis laporan adakalanya tanpa disadari muncul bahasa yang dapat merugikan orang lain – atau dianggap merugikan oleh orang lain – yang dapat menjadi perkara di pengadilan. Wartawan dan editor atau redaktur haruslah cermat memperhitungkan kemungkinan seperti itu.

Hal yang penting juga perlu dipertimbangkan adalah aspek pendidikan publik. Aspek pendidikan publik dapat beraneka ragam. Moralitas jurnalisme biasanya mencegah wartawan menimbulkan pengaruh buruk lewat laporannya. Tetapi, tidak selamanya dan tidak semua jurnalis arif dalam mempertimbangkan segi moral ini.

Pemakaian istilah “menghadap presiden” lahir dari kebiasaan berbahasa yang bernafaskan feodalisme. Bahasa seperti itu adalah bahasa keraton. Istilah “menghadap” menjadikan presiden bagaikan raja dengan kekuasaan absolut. Padahal, dengan memakai istilah “menemui presiden” si pelapor tersebut sama sekali tidak berbuat tidak sopan.

Kebiasaan berbahasa seperti itu tidak mendidik, tidak bermoral dan tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan, itu telah menghidupkan semangat feodalisme dan tidak sehat karena bertentangan dengan semangat demokrasi. Oleh karenanya, media harus cerdas dalam berbahasa ketika menulis berita.

Profesor Bakhtiar Ali, guru besar ilmu komunikasi UI, mengatakan, media yang cerdas tidak pernah secara serta merta memuat berita atau pernyataan dalam bahasa yang *vulgar*. Pers, kata Bakhtiar Ali, bukan hanya sebatas profesi, tetapi ia adalah panggilan hati nurani. (Tabloid Modus Aceh, Edisi 1, Minggu kedua, Oktober 2006, h. 2)

Contoh kasus berita berikut ini:

Korban Tenggelam Ditemukan Tewas

BANDA ACEH – Aiyub (28), satu dari dua korban tenggelam di laut Pasir Putih Krueng Raya, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, Minggu (12/5) sore, akhirnya ditemukan telah meninggal sekitar pukul. 11.50 WIB kemarin di pinggir pantai kira-kira dua kilometer arah barat tempat dia mandi tiga hari lalu. Sedangkankan rekan Aiyub bernama Masykur (21) ditemukan tewas satu jam kemudian setelah tenggelam. (Harian Serambi Indonesia, Rabu 15 Mei 2013, h.3)

Pada judul berita dengan tulisan tewas dan pada uraian teras (*lead*) berita, dengan kalimat ditemukan tewas, media Harian Serambi Indonesia telah mengabaikan moral (etika), sehingga masih menggunakan bahasa-bahasa *vulgar* dalam penulisan berita. Bahasa *vulgar* yang digunakan dalam penyebutan istilah tewas kepada manusia, tentu dan pasti tidak layak diterima oleh pihak keluarga korban.

Judul berita hendaknya melaporkan peristiwa atau masalah (*telling the story*). Saat membaca judul, *audience* mengetahui informasi yang paling pokok untuk pertama kalinya. Uraian yang lebih jelas mengenai informasi paling pokok itu dapat dia peroleh di dalam *lead*, dan pada saat itu pembaca mendapatkan inti cerita untuk kedua kalinya. Penjelasan yang lebih lengkap ditemukan – yang ketiga kalinya – dalam tubuh berita. Karena itu, judul laporan tidak boleh berupa *label head* (judul merek). *Label head* hanya sekedar memberi tahu cerita apa yang ada di bawah judul tersebut. Ia tidak menceritakan kejadian atau masalah. Contoh “Situasi Terakhir di Tange” adalah *label head*. “Gempa Susulan Mengguncang Tange” adalah judul yang sifatnya *telling the story*.

Berita adalah Peristiwa

Berita adalah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan di media massa. (Husnun N DJuraid, 2007)

Wartawan disaat menulis berita harus tanang dan teliti serta bersikap arif dan bijak. Kalau peristiwa itu menyangkut dengan kemanusiaan atau kemaslahatan umat, wartawan harus memberitakannya. Kasus korupsi misalnya, wajib dipublikasi karena mereka mengurus uang rakyat. “Ini namanya idealis, tepat dan tegas dalam bersikap”. Secara realita, pola pikir dengan menggunakan rasio ‘apa dampak kalau berita tersebut terekspos.’

Dampak negatif dan positif akibat pemberitaan itu pasti ada. Kalau hanya persoalan pemberitaan, kemudian si wartawan harus dibunuh – ini nanti dulu. Nah, disini si wartawan harus berpikir, aman atau bisa membahayakan dirinya kalau berita terbit.

Berita senantiasa menghindari gambar-gambar atau ungkapan yang tidak bermoral, menjauhi promosi kemaksiatan, atau berita-berita yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti berita bohong, menyebarkan fitnah, memutarbalikkan fakta, kemungkar dan sebagainya.

Rasulullah SAW pernah diserang dengan berita bohong mengenai keluarganya. Allah SWT mengecam keras orang-orang yang berkhianat dengan menyebarkan berita yang tidak benar, sesuai dengan firman-Nya:

Artinya, “Dan siapa diantara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar”. (QS An-Nur)

Salah seorang Ummu Al-Mukminin dituduh terlibat dalam sebuah “skandal”. Ketika berita-berita itu tersebar, banyak orang terkecoh. Sampai-sampai Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid untuk menceritakan perceraian dengan isterinya, Aisyah ra, karena wahyu tidak turun. Usamah bin Zaid mengemukakan pendapatnya, “Wahai Rasulullah, isteri tuan adalah keluarga baik-baik.” Adapun Ali bin Abi Thalib mengembalikan putusan itu kepada beliau. Lalu Ali berucap, “Allah tidak pernah menyempitkan tuan dan masih banyak wanita-wanita selain dirinya. Untuk itu, sebaiknya tuan bertanya kepada Barirah (pembantu rumah tangga Aisyah) pasti ia akan menerangkan yang benar, (Suf Kasman, 2004)

Hampir saja keluarga mulia itu berantakan karena diterpa dengan berita fitnah yang keji, sikiranya Allah SWT tidak menurunkan ayat-ayat yang menunjukkan kepalsuan (berita bohong) yang bersumber dari Abdullah bin Ubai bin Salul itu. Ayat tersebut sekaligus mengingatkan kaum muslimin untuk tidak lagi mudah mempercayai desas-desus. Turunlah QS. An-Nur, 23:

Artinya, “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la’nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar”.

Berita adalah informasi baru dan penting yang menarik untuk diketahui masyarakat luas. Informasi berisi fakta yang merupakan bahan mentah berita. Berita dapat menyangkut peristiwa, keadaan dan manusia. (Maskun Iskandar, 2004)

5. TEMUAN PENELITIAN

Tidak bisa dipungkiri, ternyata Harian Serambi Indonesia, masih memunculkan bahasa-bahasa yang mengabaikan moral (etika) dalam pemberitaan. Buktinya, masih terdapat bahasa seperti mesum, seks, dan lain-lain sejenis itu dalam pemberitaan. “Pers pada prinsipnya mendidik masyarakat supaya makin hari makin bagus moralnya. Lebih-lebih di Bumi Serambi Mekkah, dengan diberlakukannya syari’at Islam. “Sudah saatnya, bahasa-bahasa yang tidak bermoral dihilangkan oleh Serambi Indonesia dalam pemberitaan”.(Hasil Wawancara dengan Mukhsinuddin, tokoh agama Aceh Barat),

Sebagai pelopor, pendekatan positif menekankan, keberpihakan wartawan dihilangkan dalam proses pembuatan berita. Artinya, pertimbangan moral (etika) yang dalam banyak hal selalu bisa diterjemahkan sebagai bentuk keberpihakan haruslah disingkirkan. Intinya, realita haruslah didudukkan dalam fungsinya sebagai realita yang faktual, yang tidak boleh dikotori oleh pertimbangan subjektif. Wartawan disini fungsinya hanya sebagai pelopor, ia hanya menjalankan tugas untuk memberitakan fakta. Berita ditulis hanyalah untuk fungsi penjelas (*eksplanasi*) dalam menjalankan fakta atau realitas. (Eriyanto, 2009)

Media massa sebagai perangkat materil komunikasi massa, memiliki peran paling besar dalam menerapkan dan membangun konstruksi sosial. Berdasarkan hal itu, kajian ‘kebahasaan media’ Harian Serambi Indonesia dalam pemberitaan penerapan moralitas mutlak dibutuhkan.

Contoh berita berikut lain:

Ulama Bakar 100 Celana Ketat

LHOKSUKON – Ulama yang tergabung dalam organisasi Tazkiratul Ummah Aceh Utara, membakar 100 celana panjang ketat, batu domino, dan kartu joker, di halaman Masjid Agung Baiturrahim Lhoksukon, Aceh Utara, Selasa (21/5). Celana itu, didapat dari hasil razia ulama bersama wilayatul hisbah (WH) dalam setahun terakhir. “Pemusnahan hasil razia ini menandai rangkaian ulang tahun pertama Tazkiratul Ummah. Digelar juga ceramah yang disampaikan Teungku Haji Abdullah (Abu Krueng Lintang Aceh Timur)” kata Ketua Tazkiratul Ummah Aceh Utara, Tgk H Nurdin Usman, kepada Serambi kemarin. Dalam cacatan Serambi, sejak deklarasi penerapan syariat Islam secara kaffah di Aceh Tahun 2001, belum pernah gabungan ulama melakukan aksi pembakaran celana panjang ketat yang didapat dari hasil razia bersama WH. Baru di Aceh Utaralah kemarin, atas prakarsa ulama Tazkiratul Ummah setempat, pembakaran celana sempit itu dilakukan. Sebelumnya, di Aceh Barat, Bupati Ramli gencar melakukan kampanye anti celana ketat bagi perempuan yang bermukim maupun yang berkunjung ke kabupaten itu. Dalam beberapa kali razia yang diujungtombacki WH setempat, banyak perempuan yang digunting celana panjangnya, lalu diganti dengan rok yang disediakan Pemkab Aceh Barat. Sejalan dengan semangat itu, Tgk Nurdin Usman dari Tazkiratul Ummah Aceh Utara mengimbau agar setiap orangtua di Aceh melarang anaknya mengenakan pakaian ketat, sebab hal itu tidak sesuai dengan adab dan tuntunan berpakaian umat Islam. “Kita minta agar guru dan kepala sekolah mengajak seluruh siswa-siswinya mengenakan pakaian yang menutup aurat,” Imbau Tgk Nurdin. Pihaknya juga meminta Pemkab Utara agar mengalokasikan dana untuk pelaksanaan eksekusi ter hukum cambuk di kabupaten itu. Soalnya, sejak empat tahun terakhir, Pemkab tidak lagi mengalokasikan dana untuk uqubat cambuk tersebut. (c46) . (Harian Serambi Indonesia, 22 Mei 2010, h.1)

Berdasarkan berita pelanggaran Syari'at Islam diatas, termasuk salah satu berita islami di Harian Serambi Indonesia yang cenderung menggunakan gaya bahasa *technical reasoning* (bahasa teknis). Artinya, berita tersebut termasuk dalam kategori menalarakan pernyataan dari narasumber semata, lalu disajikan kepada pembaca.

Bahasa *technical reasoning* dalam pemberitaan tersebut tercermin dari materi berita. Harian Serambi Indonesia telah berupaya merasionalkan fakta dari narasumber, tanpa ada upaya kritis mencari dukungan masyarakat untuk membenarkan, bahwa tindakan yang menamakan dirinya sebagai ulama membakar 100 helai celana ketat sudah tepat. Secara teoritis, bahwa penalaran teknis disajikan dengan maksud menyatakan bahwa fakta peristiwa itu dipandang rasional.

Selain itu juga terdapat bahasa yang *diskriminatif*, karena dalam pemberitaan tersebut, Serambi Indonesia, sedikitpun tidak menerangkan proses di mana celana tersebut diperoleh. Paling tidak, Harian Serambi Indonesia wajib melakukan ricek dan menelusuri kebenaran bahwa tindakan membakar celana itu, benar dari hasil razia?. "Ini merupakan cerminan sebuah rekayasa untuk mencari sensasi bahwa orang-orang yang menamakan dirinya ulama itu, ikut berupaya bertindak bagi siapa saja yang melanggar Syari'at Islam".

Bahkan, yang lebih aneh lagi, tindakan pembakaran pakaian tersebut, sebagai bentuk ditandainya rangkaian ulang tahun pertama Tazkiratul Ummah. Lalu apa hubungannya antara ulang tahun dengan mengambil tindakan membakar celana ketat tersebut. Secara tidak sadar, Serambi Indonesia, telah "digiring" oleh tindakan sepihak.

Seandainya Serambi Indonesia, ingin menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol dan sebagai media pendidik masyarakat, pemberitaan seperti itu, seyogyanya tidak sekedar menjadikan peristiwa rutin saja, tetapi juga diulas secara mendalam dan dianalisis secara kritis agar masyarakat menjadi cerdas dalam memahami setiap pemberitaan.

6. KESIMPULAN

Dari hasil observasi, wawancara, penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa kredibilitas, kejujuran dan kebenaran moral harus melekat, dijunjung tinggi dan harus dipatuhi dalam kehidupan setiap wartawan.

Kesadaran moral bagi wartawan dapat membangkitkan semangat dan perhatian (*respect*) publik dalam menerima informasi. Akar dari kesadaran moral adalah hati nurani yaitu benar, berani, baik, jujur, adil, dan berimbang bagi wartawan dalam menyajikan informasi.

Moral (etika) meliputi berbagai aspek. Ia dapat menyangkut nama baik dan harga diri seseorang, yang dapat berubah menjadi kasus hokum. Idealisnya, wartawan harus berpegang pada prinsip moral, kode etik wartawan "katakan yang benar walaupun pahit". Follow-up berita hasil konfirmasi dengan narasumber sudah harus disajikan, walaupun cara seperti itu bukanlah cara yang ideal.

Harian Serambi Indonesia dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat ternyata terkesan masih kurang mempertimbangkan segi moralitas, artinya masih terdapat bahasa-bahasa *vulgar*, kalimat yang tidak *fair*, dalam pemberitaan seperti menulis kata-kata tewas, seks, mesum, dan penyebutan "preman politik" yang disampaikan pihak-pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, namun ditulis oleh wartawan Harian Serambi Indonesia.

Diakui, tanpa ada pemberitaan lewat media, segala peraturan, kebijakan dan tindakan pemerintah tidak dapat diketahui oleh masyarakat luas. Ini suatu bukti bahwa Harian Serambi Indonesia telah berperan ikut mendukung kebijakan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Hal itu, menunjukkan semangat dan intensitas Harian Serambi Indonesia dalam memberikan dukungan kepada pemerintah tentang informasi pembangunan secara

menyeluruh semakin baik, namun berita-berita yang mengandung nilai kemanusiaan dan agama masih rendah, jika dilihat dari eksistensi Harian Serambi Indonesia sebagai media lokal tersebut berada di Nanggroe Syari'at.

7. SARAN PENULIS

Dari paparan yang telah diuraikan penulis perlu memberikan saran dan rekomendasi kepada wartawan Indonesia dan kepada Harian Serambi Indonesia, sebagai berikut:

1. Wartawan Indonesia harus benar-benar mempertimbangkan segi moral (etika) sesuai dengan kode etik wartawan dalam menulis berita.
2. Wartawan Indonesia harus memegang teguh fakta-fakta yang terjadi dan mempublikasikan dengan penuh tanggungjawab tanpa harus takut akan resiko yang dihadapi.
3. Harian Serambi Indonesia perlu memperhatikan sikap dan perilaku wartawan dalam menulis, sehingga kata-kata yang melanggar moral (etika) sebaik mungkin dapat dikurangi kalau tidak dapat dicegah sama sekali.
4. Sebaiknya, Harian Serambi Indonesia perlu melakukan pembinaan secara rutin kepada wartawan terutama menyangkut cara menulis berita, dan kemampuan memahami ilmu jurnalistik dengan baik, Meskipun *visioner* dan latar belakang berbeda yang dimiliki wartawan, namun dapat menyeragamkan visi dalam menulis.

8. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Alex Sobur, *Analisis Teks Media, suatu pengantar Analisis wacana, Semiotik dan Analisis Framing*, Cet. Ke-5, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Abd. Rani Usman, *Etnis Cina Perantauan di Aceh*, edisi Ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

As. Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia*, Cet. Ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-metode Riset Kualitatif*, Cet. Ke-1, Jakarta: Bentang Pustaka, 2008.

Bil Kovach dan Tom Rosentiel, *Elemen-elemen Jurnalisme*, Cet. Ke-2, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2003.

Departemen Agama RI, *Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid XI, juz 29, Jakarta: YPPA, 1995.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1, ed.Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Eriyanto, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Cet. Ke-6, Yogyakarta: LKiS, 2009.

Eriyanto, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, Cet. Ke-7, Yogyakarta: LKiS, 2009.

- Ermanto, *Wawasan Jurnalistik Praktis, Peluang dan Tantangan Wartawan Kreatif*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Cinta Karya Griya Purwo Asri, 2005.
- Herbert Strentz, *Reporter dan Sumber Berita*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Husnun N Djuraid, *Panduan Menulis Berita*, Cet. Ke-2, Malang: UMM Press, 2007.
- Maskun Iskandar, *Panduan Jurnalistik Praktis*, Cet. KeII, Jakarta: Lembaga Pers Dr. Sutomo, 2004.
- Septiawan Santana K, *Jurnalisme Investigasi*, Cet. Ke-2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Septiawan Santana K, *Jurnalisme Kontemporer*, Cet. Ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Suf Kasman, *Jurnalisme Universal, Menelusuri Prinsip-prinsip Dakwah Bi Al-Qalam dalam Al-Qur'an*, Cet. Ke-1, Jakarta: Teraju Khazanah Keilmuan, 2004.
- Yunidar, *Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Kompas dan Republikan Selama Darurat Militer Di Aceh*, Cet. Ke-1, Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 2009.